



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Yth. **Seluruh Kepala Perangkat Daerah**

SURAT EDARAN

Nomor B-13/BAPPEDA/000.7.2/02/2026

TENTANG

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

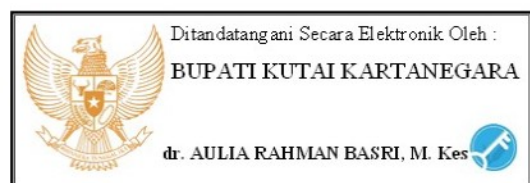
Berdasarkan hal tersebut, agar seluruh Kepala Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mempedomani sistematika Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027 (lampiran I).
2. Memperhatikan jadwal penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 (lampiran II).
3. Menjabarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 pada Dokumen Ranwal RKPD Tahun 2027 (lampiran III).
4. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Ranwal RKPD 2027 dengan melengkapi format tindaklanjut FKP (lampiran IV)
5. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah secara terkoordinasi sesuai dengan tema pembangunan (lampiran V)

Dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027 paling lambat diserahkan ke BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara (Softcopy dan Hardcopy) pada tanggal **17 Maret 2026**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 20 Februari 2026



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR {nomor_naskah}

Tentang : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027**

1. PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

2. PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

Beberapa langkah yang harus dilakukan pada tahap ini antara lain:

- 1. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

B. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunannya, Renja Perangkat Daerah harus mengacu pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan

Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2/2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3/2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2/2025)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun n-1/2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
								Target Renja-PD tahun (n-2/2025)	Realisasi Renja-PD tahun (n-2/2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan									
1	01			Bidang Urusan									
1	01	01		Program									
1	01	01	01	Kegiatan.....									
1	01	01	02	Kegiatan.....									
1	01	01	03	Dst....									
1	01	02		Program									
1	01	02	01	Kegiatan.....									
1	01	02	02	Kegiatan.....									
1	01	02	03	Dst									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Catatan :
*) indikator sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan Tabel berikut, Tabel T-C.31 :

Tabel Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah :

Lembar.....dari.....

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) dan musrenbang kecamatan (untuk kecamatan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b) Pencapaian SDGs,
 - c) Pengentasan kemiskinan,
 - d) Pencapaian SPM,
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f) Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format tabel berikut ini :

Nama Perangkat Daerah :

[illegible]

Untuk rencana tahun 2027 (kolom 2 s.d 6) harus sama dengan **hasil analisis kebutuhan** pada bab II. Prakiraan maju rencana tahun 2028 (kolom 9 dan 10) diambil dari Renstra Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian Penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar akhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama tanda tangan Kepala Perangkat Daerah serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN II

Jadwal Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Uraian Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Pernyataan Pasal Permendagri 86/2017
1	Persiapan Penyusunan RENJA		
a	penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;		
b	orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;		
c	penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;		
d	penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Paling Lambat Minggu I Bulan Desember	Pasal 126 Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
a	analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;		
b	hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu		
3	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah	Paling Lambat Minggu III Bulan Maret (17 Maret 2026)	Pasal 133 Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Paling Lambat 2 (dua) Minggu Setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima (23 Februari - 13 Maret 2026)	Pasal 136 Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) diterima.
5	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Paling Lambat 1(Satu) Minggu Setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan (April 2026)	Pasal 142 Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

LAMPIRAN III

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 pada Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

LINK DOKUMEN :

<https://drive.google.com/file/d/1Y-P2qd-qK3Twi9xiR30JKZ40Fh99bzC4/view?usp=sharing>

LAMPIRAN IV

Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

Lampiran ini merupakan hasil pemetaan intisari dari berbagai masukan yang muncul dari FKP RKPD Kab Kukar Tahun 2027. Intisari yang dimaksud berasal dari notulensi dari hasil diskusi FKP, yang kemudian dikonversi menjadi poin-poin masukan yang perlu direspon oleh seluruh komponen perangkat daerah di Kabupaten Kukar. Hasil poin masukan tersebut disusun tanpa mencantumkan nama Lembaga atau person yang mengusulkan, hal ini difungsikan agar tindaklanjut dapat lebih focus kepada substansi materi usulan, dan tidak sebatas subjektif semata. Akan tetapi jika diperlukan informasi pihak yang mengusulkan dalam FKP tersebut, maka OPD terkait dapat membaca berita acara dan notulensi dari pelaksanaan FKP RKPD Kab Kukar Tahun 2027. Tabel dibawah ini merupakan poin masukan FKP yang perlu direspon oleh masing-masing OPD yang terkait.

Tabel. Matriks Kertas Kerja Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak) ¹	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah ²	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir) ³
	Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan					
1	Terdapat market gap dan permasalahan link and match antara supply tenaga kerja dengan permintaan industry, maka perlu dilakukan peningkatan skill untuk daya saing tenaga kerja KUKAR khususnya untuk menjawab permintaan pasar secara khusus, dan juga pengembangan skill entrepreneurship dalam bidang ekonomi kreatif lainnya.	Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
2	Perlu dilakukan rasionalisasi keuangan daerah untuk merespon pengurangan transfer ke daerah, melalui pemetaan minimum operasional di masing-masing OPD, dan refocusing anggaran daerah untuk program strategis yang berdampak luas.	Kuangan Daerah	BPKAD			

¹ (Diisi oleh OPD) Isikan tanggapan dari OPD terkait, apakah akan diakomodir dalam renja 2027 atau tidak, dengan pertimbangan bisa dimungkinkan isu ini telah terakomodir dalam program tahun 2026 atau sebelumnya.

² (Diisi oleh OPD) Berikan keterangan penjelasan kenapa usulan tersebut diakomodir atau tidak

³ (Diisi oleh OPD) Jika usulan akan diakomodir, maka perlu diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan apa yang ada didalam renja 2027 dari OPD terkait

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
3	Perlu dikembangkan program untuk meningkatkan kohesi social Masyarakat untuk mewujudkan ketahanan social dalam menghadapi berbagai ancaman krisis kedepan	Sosial	Dinas Sosial			
4	Perlu program pemberdayaan kebudayaan yang dapat menyentuh ekonomi pelaku kebudayaan di kukar	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
5	Terdapat permasalahan tingkah laku anak yang ketergantungan akan gadget HP, oleh karena itu diperlukan program untuk mengatasi ketergantungan ini melalui berbagai pendekatan baik untuk sasaran anak atau komunitas, maupun dari sisi pendampingan keluarga	Pendidikan & Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas P3A			
6	Mengalokasikan 20% APBD untuk tujuan Pendidikan yang kemudian bisa dioptimalkan dalam fokus program transformasi pendidikan kedepan (tidak hanya masalah pembangunan infrastruktur fisik semata)	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
7	Perlu pengembangan program Pendidikan karakter dan ahklak untuk anak-anak Kukar, yang dapat dikembangkan melalui berbagai Lembaga Pendidikan baik formal, informal maupun	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	non formal					
8	Diperlukan penyaluran mahasiswa yang memperoleh beasiswa pemda untuk Kembali mengabdikan di Kukar setelah lulus kuliah, tetapi perlu diberikan wadah yang sesuai dengan skill mereka	Ketenagakerjaan	Disnakertrans			
9	Pemberdayaan Masyarakat melalui optimalisasi masjid-masjid di kukar, salah satunya melalui pendataan jamaah yang bisa mengarahkan kepada ikatan jamaah masjid yang lebih erat dan saling bertanggung jawab					
10	Apakah diperlukan sertifikasi halal atau minimal pelatihan pengolahan makanan yang halal untuk aktivitas MBG					
11	Perlu integrasi untuk bekerja Bersama dalam proses pengembangan dan pendampingan terhadap sertifikasi halal untuk rumah potong unggas antara pemda dengan MUI					
12	Perlu pengawasan dan penilaian capaian di setiap Lembaga Pendidikan yang masih terdapat murid yang belum bisa CALISTUNG, hal ini terkait target peningkatan					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	literasi dan numerasi di Kab Kukar					
13	Saat ini para guru telah melaksanakan kegiatan sharing antar guru dalam mengembangkan media pembelajaran inovatif. Oleh karena itu, pemda perlu menyiapkan forum diseminasi karya inovatif guru, dan program insetif agar guru dapat tergerak dalam membuat karya-karya inovatif dalam pembelajaran					
14	Diperlukan perluasan sekolah inklusif khusus untuk anak berkebutuhan khusus, terutama di beberapa kecamatan yang belum tersedia					
15	Usulan untuk akreditasi terhadap seluruh perpustakaan sekolah					
16	Biaya BOS untuk sekolah perlu dinaikkan mengingat meningkatnya pembiayaan dalam operasional sekolah. Usulan ini perlu direspon melalui perhitungan teknis agar komponen apa yang diperlukan untuk dinaikkan secara rasional					
17	Perlu pengembangan aktivitas seni dan budaya di Tingkat desa untuk meningkatkan					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	partisipasi Masyarakat dalam bidang seni dan budaya					
18	Aktivitas seni pertunjukan ditingkat kabupaten perlu ditingkatkan, tetapi tidak hanya mengundang Bintang tamu luar semata, melainkan perlu memberikan kesempatan bagi pelaku seni pertunjukan dari internal kukar					
19	Pemberian beasiswa pemda harus jelas arahnya, apakah harus mendukung sektor pertambangan atau industry ekstraktif semata, atau perlu melakukan reinvestasi pengembangan SDM di sektor lain untuk mendukung transformasi ekonomi kab kukar					
20	Perlu dibentuk tim ad hoc sebagai forum komunikasi bidang Pendidikan yang terdiri dari lintas pihak (bukan hanya pemerintah semata), tim ini dapat secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi terkait perkembangan dunia Pendidikan di kab kukar					
21	Diperlukan materi Pendidikan terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (missal penggunaan AI, dll)					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	secara arif untuk perkembangan masa depan anak-anak di Kukar					
22	Perlu pengembangan sektor vokasional untuk anak-anak disabilitas					
23	Perlu dikembangkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang mensasar anak-anak dengan berkebutuhan khusus					
24	Masih banyak kecamatan yang belum memiliki praktik dokter gigi, maka diperlukan program yang dapat menarik profesi dokter gigi untuk berpraktik di seluruh kecamatan di Kukar					
25	Ikatan Dokter Indonesia kedepan akan berfokus dalam pengembangan Pustu, maka pemda perlu bergerak bersinergi dengan profesi tersebut					
26	Ada rencana pengembangan Rumah Sakit Baru di Muara Badak, maka pemda beserta para profesi perlu berkoordinasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang akan dikembangkan					
27	Diperlukan seleksi calon dokter di setiap kecamatan, yang kemudian dapat disinergiskan dengan program beasiswa, agar dapat mengisi kebutuhan					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	tenaga Kesehatan di seluruh kecamatan di kab kukar					
28	Akreditasi untuk peningkatan kualitas pelayanan pada rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas Kesehatan lain perlu segera ditingkatkan					
29	Saat ini pasca muncul peraturan baru tentang perijinan (KBLI baru), maka banyak kendala terkait perijinan Lembaga praktik Kesehatan, maka pemda perlu Menyusun tim dan kebijakan pendampingan dalam memberikan kemudahan dalam proses registrasi ulang perijinan	Perijinan	DPMPTSP			
30	Diperlukan pendampingan materi terkait bahaya narkoba dan miras kepada anak-anak kukar (dengan catatan pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dilakukan secara sistemik, tidak hanya seremonial semata)					
	Bidang Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Ekonomi					
31	Perlu dipetakan sektor strategis yang dapat mewujudkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6,37% di kabupaten Kukar pada tahun 2027					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
32	Perlu dikembangkan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi, serta program direktif presiden yang akan dilaksanakan di kukar					
33	Perlu pengembangan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pemetaan dinas-dinas yang potensial sebagai revenue center, serta dapat mengoptimalkan pendapatan bukan hanya diperkotaan semata, tetapi optimalisasi potensi pendapatan di perdesaan, dan juga optimalisasi peran BUMD					
34	Perlu melakukan efisiensi belanja khususnya untuk sektor non prioritas dan penambahan asset, sehingga perlu mengoptimalkan belanja yang mengarah kepada optimalisasi dampak langsung					
35	Perlu pelatihan studi tiru untuk petani-petani kukar terkait dengan inovasi bidang pertanian masa depan					
36	Terdapat permasalahan dampak dari Pembangunan green house di rumah sakit,					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	yang kemudian menjadikan pemenuhan kebutuhan rumah sakit mandiri, hal ini berdampak kepada pembelian kebutuhan di pasar. Permasalahan ini harus direspon secara seimbang dari berbagai sisi.					
37	Perlu pengembangan lahan KWT menjadi tempat wisata, tetapi perlu standarisasi atraksi wisata yang bervariasi dan tidak sama antar satu KWT dengan lainnya					
38	Perlu pengembangan ketrampilan anggota KWT untuk mengakses pasar digital					
39	Terdapat masalah dilapangan yaitu dampak dari aktivitas tambang terhadap perubahan cuaca yang mengakibatkan keberlanjutan lahan pertanian KWT					
40	Daya saing desa wisata rendah, karena terkendala amenities dan aksesibilitas menuju desa wisata					
41	Diperlukan pengembangan UMKM di beberapa desa wisata yang tercatat sebagai usaha formal, hal ini akan berdampak juga terhadap pemberian insentif dan peningkatan pendapatan					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	daerah					
42	Tingkat okupasi fasilitas perdagangan Tenggarong square masih rendah, apakah ini terkedala modal para pelaku perdagangan, atau ada factor lain? Perlu dibuatkan kebijakan khusus, apakah fungsi tenggarong square tidak hanya diarahkan untuk perdagangan offline semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung aktivitas perdagangan online (missal difungsikan sebagai fasilitas logistic atau pergudangan)					
43	Perlu pelatihan peningkatan skill pedagang untuk bisa mengakses pasar online					
44	Perlu pengembangan ekonomi di wilayah hulu, dengan syarat dikembangkan fasilitas pemantik yang sesuai dengan potensi di wilayah hulu (salah satunya bisa melalui pengembangan fasilitas ekonomi di titik kumpul ekonomi di beberapa wilayah hulu)					
45	Perlu disusun forum-forum komunikasi pengembangan ekonomi, khususnya antara pemda dengan Masyarakat,					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	dan dilakukan secara rutin, agar bisa menangkap aspirasi dan rekomendasi dalam pengembangan ekonomi local					
46	Permasalahan tata Kelola pasar yang perlu diperbaiki, apakah akan murni dikelola penuh pemda atau memungkinkan diberikan peluang untuk pengelola yang professional non pemerintah					
47	Perlu pengembangan system informasi dan regulasi terkait pemanfaatan asset pemerintah di kukar, agar dapat memungkinkan bagi Lembaga non pemerintah dapat bekerjasama dalam pemanfaatan berbahai asset tersebut					
48	Penyiapan sektor hulu dari rencana pengembangan KEK kukar, agar Masyarakat dapat terdampak dari aktivitas ekonomi kedepan					
49	Perlu pengembangan 4 sektor strategis yang potensial di kukar yaitu sektor kuliner, seni pertunjukan, kriya dan fashion					
50	Perlu koordinasi dengan PLN terkait program pelaksanaan Listrik desa, agar dapat menyentuh seluruh desa yang					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	belum teraliri Listrik di kukar					
51	Perlu pengembangan infrastruktur energi, khususnya yang berbasis EBT di Kukar					
52	Terdapat permasalahan untuk Listrik SPPG (program MBG) yang diluar jangkauan tiang PLN, apakah perlu dibuatkan kebijakan khusus dari pemda					
53	Perlu dukungan untuk peningkatan pendapatan BUMD dari sektor migas melalui optimalisasi deviden dari PI 10%, serta akses terhadap tambahan konsesi blok migas di kukar					
54	BUMD migas kukar perlu peningkatan kolaborasi terhadap pengelolaan cadangan gas alam lainnya, untuk memperluas dan meningkatkan skala usaha					
55	Ada peluang usaha pada sektor HSE dan penyediaan barang dan jasa di sektor migas untuk Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di kukar					
56	Perlu pendampingan dan dukungan advokasi terhadap regulasi teknis yang terkait dengan pengembangan bisnis aneka usaha seperti PLTS, dll yang belum menguntungkan					

No	Poin Hasil FKP RKPD 2027	Urusan	Perangkat Daerah	Tanggapan Perangkat Daerah (Diakomodir / Tidak)	Keterangan Tanggapan Perangkat Daerah	Tindak Lanjut dalam Sub Kegiatan Renja OPD (Jika Diakomodir)
	pengusaha local khususnya BUMD					
57	Belum ada satupun project di kukar yang mengoptimalkan peran BUMD, hal ini berpengaruh terhadap pendapatan BUMD dan pemda kedepan					
58	Perlu dilakukan reboisasi dan penghijauan di kukar, akibat dari pengurangan pepohonan yang hilang					
59	Perlu perawatan dan revitalisasi asset pemda kukar agar dapat dioptimalkan menjadi pemasukan daerah					
60	Perlu revitalisasi infrastruktur drainase perkotaan di Tenggarong, yang juga ada beberapa berasal dari peninggalan belanda					
61	Perlu pengusulan daerah irigasi untuk diperluas, sehingga dapat ditingkatkan menjadi wewenang provinsi dan pemerintah pusat untuk masuk ke Kawasan pertanian di kukar.					

Lampiran V

Pembagian Kelompok Kerja OPD untuk Tindak Lanjut Hasil FKP

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

Berdasarkan hasil FKP RKPD Kab. Kukar Tahun 2027 sebagaimana telah disampaikan dalam Lampiran IV, maka Upaya tindaklanjut harus dilakukan melalui pelaksanaan Forum Lintas OPD yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kerja (pokja). Pokja ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tindaklanjut hasil FKP tersebut yang kemudian dapat menghasilkan luaran berupa rekomendasi pelaksanaan program sampai dengan sub kegiatan yang akan dimuat dalam masing-masing rencana kerja (renja) di masing-masing OPD.

Pelaksanaan tindak lanjut oleh setiap pokja ini harus didasarkan oleh minimal tiga dokumen yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Ketiga dokumen tersebut diantaranya adalah:

- 1. Dokumen hasil FKP RKPD Kab Kukar Tahun 2027 (Lampiran IV)
- 2. Dokumen hasil musrenbang Tingkat kecamatan
- 3. Dokumen hasil telaah mandat perencanaan tematik Kab. Kukar untuk tahun 2027

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka pada Tabel berikut ini, telah dilakukan pembagian pokja yang didasarkan pada kelompok urusan yang saling terkait.

Tabel. Pembagian Kelompok Kerja OPD

No	Nama Kelompok Kerja	OPD Koordinator	OPD Anggota	Target Waktu Pelaksanaan Forum Lintas OPD
1	Pokja Pendidikan	Ketua: Asisten 1 Setda Wakil Ketua: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas P3A; Dinas Sosial; Dst.	23 Februari - 13 Maret 2026
2	Pokja Kesehatan	Ketua: Asisten 1 Setda Wakil Ketua: Dinas Kesehatan	Dinas Sosial;dst.	
3	Pokja Sosial dan Kebudayaan	Ketua: Asisten 1 Setda Wakil Ketua: Dinas Sosial	Dinas Pendidikan & Kebudayaan; dst.	
4	Pokja Infrastruktur	Ketua: Asisten 2 Setda Wakil Ketua: Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan;dst	
5	Pokja Pengembangan Ekonomi	Ketua: Asisten 2 Setda Wakil Ketua: Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
6	Pokja Lingkungan	Ketua: Asisten 2 Setda Wakil Ketua: Dinas Lingkungan Hidup		
7	Pokja Pelayanan Pemerintah	Ketua: Asisten 3 Setda Wakil Ketua: DPMPPTSP		
8	Pokja Pendapatan Daerah	Ketua: Asisten 3 Setda Wakil Ketua: Bapenda		

*Akan disesuaikan dengan surat edaran pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah